DAFTAR ISI

JURNAL SIDANG MPR-RI

EDITORIAL **Hal.**

- ERA BARU PERGI, ERA BARU DATANG (Lagi)..... 2.

  Mengejar target dari segi kuantitas hanya akan menciptakan ketidakadilan. Bagi pihak-pihak tertentu – bisa dikategorikan sebagai *the bad people* – akan mencari celah-celah kelemahan undang-undang itu dan cara-cara lain di sekitar undang-undang itu. Sementara pihak lain – katakanlah *the good people* – akan melakukan hal-hal yang benar, menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengecek apa tepatnya ketentuan-ketentuan undang-undang itu sebelum mereka bertindak. *The more laws, the less justice*.

LAPORAN UTAMA

- Hasil Amandemen UUD Masih Perlu Disosialisasikan..... 3.

  "Saya berharap hal yang sama bisa kita lakukan terus menerus dan menjadi bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas kehidup-an berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks demokrasi, demokra-tisasi, melaksanakan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia maupun yang terkait dengan kebebasan pers yang menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945," kata Hidayat.

LIPUTAN 4.

- Silaturahmi Pimpinan MPR Dengan Media Massa..... 5.
- H. Aksa Mahmud : Saya Siap Kembali..... 5.
- Aksa Mahmud: Jika Saya Memiliki Potensi, Teman-teman Memilih Saya..... 6.
- Kita Saling Mengisi dan Tenggang Rasa..... 6.
- Gladi Kotor Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR..... 7.
- Hidayat Nur Wahid: Tunggu Keputusan Partai.....
- Mooryati Soedibyo: Dekat Dengan Konstituen dan Perjuangkan Aspirasi Rakyat..... 7.

SERBA SERBI

- 575 Wartawan Siap Meliput Sidang Paripurna MPR 2009..... 8.
- Hidayat Nur Wahid dan Wali..... 8.

TOKOH HARI INI

- Hidayat Nur Wahid Turut Serta Mengedit Gambar Video..... 9.

- **Daftar Nama Anggota MPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009**..... 10.

ERA BARU PERGI, ERA BARU DATANG (Lagi)

The more laws, the less justice.

Hari ini 29 September 2009, MPR akan menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2004-2009 yang diisi dengan penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan MPR. Sebelumnya, DPD telah menggelar sidang yang sama pada hari Senin 28 September 2009, dan besok DPR akan menggelar Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang.

Selama 5 tahun berkiprah dalam kehidupan politik di negara ini, MPR tidak dapat dinilai sebagai lembaga MPR semata. Karena MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Karena itu, untuk mengetahui kinerja MPR sebagai lembaga permusyawaratan lebih tepat dengan menilai kinerja DPR dan DPD – meskipun kedua lembaga itu bukan merupakan bagian dari MPR – dengan logika MPR terdiri atas anggota. Mengevaluasi kinerja MPR hanya dapat dilakukan melalui pelaksanaan wewenangnya sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR, dari 284 RUU yang menjadi agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2004-2009, 192 RUU telah selesai dibahas sampai 30 September 2009, 96 RUU merupakan inisiatif DPR dan sisanya berasal dari Pemerintah. Sementara dalam Pidato Ketua DPD pada Sidang Paripurna Khusus tanggal 19 Agustus 2009, dilaporkan sampai akhir tahun kelima , DPD telah menghasilkan 186 buah keputusan yang terdiri dari 16 buah usul RUU, 95 buah pandangan, pendapat dan pertimbangan tentang berbagai RUU baik yang berasal dari DPR maupun dari Pemerintah, dan 47 produk hasil pengawasan serta 28 pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran.

Yang menjadi soal, menurut DPD, DPD dan masyarakat tidak mengetahui sampai sejauh mana masukan dari DPD tersebut ditindaklanjuti DPR. Bahkan RUU inisiatif DPD pun tidak jelas kelanjutannya.

Melihat angka-angka statistik di atas, produktivitas DPR sebenarnya cukup tinggi, rata-rata menghasilkan 38 undang-undang setiap tahun, dengan asumsi bahwa undang-undang yang dibentuk itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 (sehingga sebagian tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi). Tujuan undang-undang atau hukum pada dasarnya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran bagi semua tanpa memihak. Karena itu undang-undang perlu dibahas secara mendalam dan sungguh-sungguh hal-hal mendasar yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara. Dengan demikian, kuantitas tidak menjadi target, tetapi kualitasnya. Sebuah undang-undang seyogyanya tidak setiap lima tahun diubah hanya untuk mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak tertentu, terutama partai politik yang ada di parlemen.

Mengejar target dari segi kuantitas hanya akan menciptakan ketidakadilan. Bagi pihak-pihak tertentu – bisa dikategorikan sebagai *the bad people* – akan mencari celah-celah kelemahan undang-undang itu dan cara-cara lain di sekitar undang-undang itu. Sementara pihak lain – katakanlah *the good people* – akan melakukan hal-hal yang benar, menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengecek apa tepatnya ketentuan-ketentuan undang-undang itu sebelum mereka bertindak. *The more laws, the less justice*.

Dengan sidang-sidang masa akhir jabatan baik MPR, DPR maupun DPD, berakhir pula era baru pasca reformasi. Kalau disepakati, periode keanggotaan tahun 1999-2004 adalah era reformasi, 2004-2009 adalah era baru, karena semua anggota MPR dipilih langsung oleh rakyat, dan 2009-2014 adalah era baru (lagi) karena anggota DPR yang terpilih adalah anggota yang memperoleh suara terbanyak, bukan berdasarkan daftar urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan (Pasal 214 b UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi).

Konsekuensi memperoleh suara terbanyak adalah setiap calon harus bertarung untuk memperoleh suara itu, tentu saja menelan biaya yang sangat besar. Boleh jadi, biaya yang dikeluarkan mungkin lebih besar dari penghasilan "resmi" sebagai anggota DPR. Anggota yang ingin mengabdikan hidupnya untuk kepentingan rakyat, mungkin tidak akan bertarung habis-habisan – dengan menakar kekuatannya – atau tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Lain halnya dengan yang menjadikan keanggotaan DPR sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Ada kemungkinan besar akan mencari-cari penghasilan "lain" di luar yang "resmi." Harapan kita, semoga yang disebut terakhir ini tidak banyak dan tidak membawa dampak negatif bagi yang disebut pertama.

Era baru pasca reformasi telah berlalu, era baru datang lagi. Etika baru perlu ditegakkan. Jangan mencuri dari rakyat. Jangan membuat janji palsu kepada rakyat. Jangan menghianati kepercayaan konstituen. Etika diartikan sebagai bermain sesuai dengan peraturan. Jangan menjadi *the bad people* yang mencari-cari celah dan lobang untuk diterobos. Lebih baik menjadi *the good people*. Sebelum bertindak, periksalah undang-undang.

Selamat jalan era baru, selamat datang (lagi) era baru.*** (edgar)

Pers Gathering Pimpinan MPR – Media Massa

Hasil Amandemen UUD Masih Perlu Disosialisasikan

Jurnal MPR (29/9). Menjelang berakhirnya masa bakti periode 2004-2005, Pimpinan MPR RI mengundang sejumlah pimpinan dan wartawan media cetak/elektronik dalam acara *Pers Gathering* di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9). Acara yang diselenggarakan MPR ini dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beserta tiga Wakil Ketua MPR: DR. A.M.Fatwa, H.M. Aksa Mahmud, dan Dr. BRA, Mooryati Soedibyo.

Dalam kesempatan ini, Pimpinan MPR menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media massa atas peran serta dan kerja sama yang terjalin sangat baik. Sejak proses pemilihan Pimpinan MPR, selama masa kerja sampai dengan diselenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan yang dilaksanakan hari ini, Selasa (29/9).

"Saya berharap hal yang sama bisa kita lakukan terus menerus dan menjadi bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks demokrasi, demokratisasi, melaksanakan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia maupun yang terkait dengan kebebasan pers yang menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945," kata Hidayat.

Hasil Kerja MPR 2004-2009

Selama masa bakti 2004-2009 banyak hal yang telah ditorehkan, baik oleh pimpinan maupun anggota MPR. Diantaranya yang paling mendasar adalah sosialisasi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), penetapan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, penerjemahan UUD NRI Tahun 1945 dalam berbagai bahasa, seperti Arab dan Inggris.

Yang penting juga, catatan keuangan MPR dikategorikan sebagai wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini sebagai langkah awal dalam pemberantasan korupsi. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi kita buktikan dalam tindakan," tegas Hidayat.

Selain itu, MPR telah membukukan risalah perubahan UUD. Hal ini disebabkan agar tidak ada lagi pemahaman yang sepotong-potong tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Bagaimana latar belakangnya, bagaimana perdebatannya ada buku tersebut," jelas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sosialisasi Perlu Ditingkatkan

Hidayat menilai hasil amandemen UUD 1945 masih perlu disosialisasikan. Sebab belum semua masyarakat mengerti dan paham terhadap hasil perubahan yang telah ditetapkan oleh MPR ini. "Memang, mensosialisasikan hasil amandemen Udang-Undang Dasar ke masyarakat menjadi salah satu capaian penting dalam masa jabatan kami. Di samping beberapa hal lainnya," ungkap Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat menyatakan bahwa sosialisasi ini penting sebelum dimungkinkannya amandemen pada masa kerja wakil rakyat yang terpilih ke depan. "Saya sangat menghargai apa yang dilakukan teman-teman yang telah susah payah melakukan sosialisasi di daerah-daerah. Tidak sedikit yang mempertaruhkan nyawanya dalam melaksanakan tugas," ungkapnya.

"UUD telah diamandemen sekali dalam empat tahap, namun belum banyak warga bangsa tahu dan mengerti. Untuk itu ke depan, Hidayat Nur Wahid menghimbau para pimpinan MPR mendatang untuk terus mensosialisasikan hasil amandemen tersebut.

Ketika ditanya tentang kemungkinan amandemen baru, AM Fatwa menyatakan hal tersebut masih terbuka. "Bagi saya tergantung situasi politik yang ada. Amandemen UUD itu akan terus bergulir," ujarnya. (Rini S. Danudjaja/Nurul Huda).

Silaturahmi Pimpinan MPR dengan Media Massa

Jurnal MPR (29/1). Senin, 28 September 2009 pukul 11.00 siang menjadi hari yang istimewa bagi kalangan media massa, baik cetak maupun elektronika. Pada hari itu kalangan media massa diundang secara khusus oleh pimpinan MPR RI dalam acara *Press Gathering*: Ramah Tamah dan Silaturahmi.

Tentu, ajang ini menjadi sangat istimewa. Sebab, biasanya wartawan yang mengundang atau memburu pimpinan MPR. Tapi, kali ini para pimpinan MPR RI yang justru mengundang dan "memburu" wartawan. Jadwal acara seharusnya pukul 11 siang, tetapi ada beberapa wartawan yang telah hadir 1 jam sebelum acara utama dimulai. Kursi-kursi di ruang delegasi gedung Nusantara V yang menjadi tempat berlangsungnya acara terlihat penuh oleh para wartawan dan beberapa pimpinan media massa.

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid didampingi tiga Wakil Ketua MPR secara bergantian menyampaikan sambutan. Acara dimulai dengan sambutan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Intinya, di samping kata pelepasan masa akhir jabatan, juga semacam laporan aktifitas dan prestasi MPR selama kepemimpinan mereka. Para pimpinan MPR secara tulus menyampaikan permintaan maaf, apalagi berbarengan dengan lebaran Idul Fitri kepada para awak media yang selama ini banyak mempublikasikan aktifitas MPR RI.

"Saya pribadi mohon maaf kepada semua wartawan, yang mungkin karena kekhilafan saya, tidak menjawab telepon, tidak membalas SMS atau undangan wawancara, ini semata-mata bukanlah kesengajaan, tetapi memang faktor kondisi kesibukan sehingga saya terlewat untuk melayani permintaan rekan wartawan semua,"ujar Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut Hidayat Nur Wahid pun memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada wartawan yang selama ini setia menjadi partner MPR dan selalu mendampingi. Untuk itulah kali ini para pimpinan MPR RI mengundang secara khusus para wartawan. "Biasanya wartawan yang mengejar-ngejar kami, sekarang kami lah yang menjadi wartawan," tambah Hidayat yang disambut koor hangat para wartawan.

Sekali lagi acara ini merupakan suatu hal yang istimewa bagi para wartawan karena biasanya para narasumber super sibuk ini hanya dapat di temui di doorstop gedung MPR RI atau ruang sidang kali ini para pimpinan MPR membuka kesempatan seluas luasnya kepada para wartawan untuk tanya jawab.

Hidayat juga digoda dengan pertanyaan pencalonan kembali dirinya sebagai ketua MPR RI. Untuk masalah ini, Hidayat menjawab dengan sangat hati-hati. Untuk pencalonan dirinya kembali lebih baik pimpinan MPR bekerja dulu sampai masa akhir jabatannya, terutama menyelesaikan agenda-agenda Negara. Baru setelah selesai akan menginformasikan pencalonan dirinya kembali.

Tentang jumlah pimpinan MPR, Hidayat menjelaskan: "Ini sudah menjadi kajian para pimpinan MPR RI, dan pimpinan MPR pernah mengusulkan kepada Pansus Susduk DPR agar pimpinan MPR RI dibatasi hanya tiga orang saja. Tetapi kajian itu kan perlu penelahaan dan pemahaman lebih lanjut," ujar Hidayat. Usai acara pun Hidayat masih dikurung wartawan, seolah tak ingin kehilangan momentum sampai 1 Oktober, ketika pimpinan baru MPR berganti. (Derry Irawan)

H. Aksa Mahmud: "Saya Siap Kembali!"

Jurnal MPR (29/9). Masa lima tahun jabatan akan diselesaikan dua hari lagi oleh H. M. Aksa Mahmud, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), koordinator bidang kebijakan pengelolaan anggaran MPR. Ditemui seusai *Press Gathering* di Ruang Delegasi Baru Lt.2 Gedung Nusantara V pada Senin (28/9), ia mengatakan siap mencalonkan kembali menjadi pimpinan MPR periode 2009-2014.

Menurut Aksa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberi dukungan penuh pencalonan dirinya. "Apabila mereka menganggap saya pantas untuk mencalonkan kembali, sudah sepantasnya mereka akan memilih saya. Tetapi, apabila mereka menganggap saya tidak pantas maju, mereka tidak akan memilih saya," ujar Aksa. Jika tak terpilih, Aksa akan tetap bekerja sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan.

Tugasnya sebagai anggota DPD memang dirasakan tidak seberat tugas sebagai Wakil Ketua MPR. Tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR sangat menyita banyak waktu. Diantaranya, harus mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan memberi pemahaman mengenai ketatanegaraan, diharapkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia akan terbangun dengan sendirinya.

Mengemban tugas sebagai wakil rakyat di MPR merupakan kebahagiaan yang tak terkira bagi suami dari Hj. Ramlah Aksa. "Selama saya melaksanakan tugas ini, saya mempunyai kebahagiaan tersendiri. Bagaimana saya setiap hari memikirkan kemajuan negara dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Tidak ada hal lain yang saya lakukan kecuali melaksanakan harapan-harapan yang dititipkan rakyat pada saya," katanya.

Pemilik Bosowa grup ini berharap kepada anggota dewan yang terpilih agar lebih memerhatikan peranan DPD dan daerah pemilihannya. Aksa yang memakai batik cokelat pada acara *Press Gathering* ini menambah-kan: "Pada lima tahun ke depan kekuatan hukum atau UU tentang pekerjaan di dalam susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD sudah mempunyai keterlibatan dan kewenangan dalam menyusun anggaran."

Sebaiknya di setiap propinsi dibangun kantor DPD sebagai tempat aspirasi rakyat di daerah. Pada periode ini, keinginan tersebut akan terwujud. Kantor DPD akan dibangun di setiap provinsi, dan staf birokrasinya pun eselon dua. Alasannya agar tugas bisa dijalankan maksimal. "DPD priode baru dapat disewakan kantor, lengkap dengan alat-alat untuk sekretariatnya sehingga DPD bisa berjalan dengan maksimal untuk menerima aspirasi rakyat," ujar Aksa. (Nurani)

Aksa Mahmud: "Jika Saya Memiliki Potensi, Teman-Teman Memilih Saya."

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud mengatakan, selama menjabat sebagai pimpinan MPR ia memiliki kebahagian tersendiri. Di samping sibuk mengurus negara atau rakyat dan berbagai masalah yang berkembang di tengah masyarakat, ia juga dituntut belajar konstitusi setiap hari. "Kita juga terus belajar mengenai UU dan berbagai revisinya," kata suami dari Hj Ramlah Aksa saat ditanya kesannya selama menjadi pimpinan MPR, di Gedung Nusantara V (28/9).

Menurut mantan Ketua Umum KADIN Sulsel, tugas dan peran MPR memang tidak seberat tugas DPR. Tugas utama MPR yang sangat menyita waktu adalah membahas perubahan UU dan melakukan sosialisasi hasil amandemen UUD 1945. "Kita memiliki tanggung jawab penuh agar rakyat paham terhadap UUD atau tata negara kita," kata anggota DPD 2004-2009 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Dia menambahkan, melalui sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas pemahaman rakyat Indonesia terhadap konstitusi. "Melalui cara ini dapat terbangun rasa nasionalisme rakyat terhadap UUD," kata ayah lima anak yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Dana Persatuan Anggar Indonesia pada tahun 2001-2004.

Pada Pemilu lalu, Aksa kembali dipercaya menjadi anggota DPD terpilih dari Sulsel untuk periode 2009-2014. Mantan anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah dari Sulsel tahun 1998-2004 memang dikenal bersahabat, ramah dan mudah diwawancarai oleh wartawan mengenai berbagai isu politik nasional saat ini. Mungkin karena itulah,mungkin, dia dipercayai kembali oleh rakyat Sulsel menjadi anggota DPD.

Pengalaman di berbagai organisasi, dan juga sebagai pimpinan MPR periode 2004-2009, mendorong Aksa kembali mencalonkan dirinya menjadi pimpinan MPR periode mendatang. Aksa mengatakan, apabila tidak terpilih akan berkosenterasi penuh sebagai anggota DPD terpilih. "Jika tidak terpilih saya tetap berkiprah menjadi anggota DPD namun bukan sebagai pimpinan MPR," papar alumnus Universitas Hasanudin ini.

Aksa menampik telah memperoleh dukungan besar dari anggota DPD terpilih nanti. Namun dia mengatakan, jika memang berpotensi maka anggota lainnya akan memilihnya dan memberikan dukungan untuk menjadi pimpinan MPR. "Kita lihat dukungannya, jika teman-teman DPD melihat saya memiliki potensi maka mereka akan memilih saya," kata mantan Anggota dewan Wali Amanat UGM Jogyakarta. (Sugeng)

Kesan-Kesan Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, MA:

"Kita Saling Mengisi dan Tenggang Rasa."

Jurnal MPR (29/9). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2004-2009 mencatat beberapa pencapaian, di antaranya mengelola usulan amandemen sesuai ketentuan dan aturan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, melakukan sosialisasi, mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melahirkan Hari Konstitusi, merevisi buku risalah perubahan (amandemen) UUD. Pencapaian itu tak lepas dari peran Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, dan dukungan Wakil Ketua DR. A.M. Fatwa, H. Aksa Mahmud, dan Hj. R.A. Mooryati Soedibjo.

Bagaimana kesan dan pesan Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, selama menjadi Ketua MPR? Dalam perbincangan, Hidayat mengungkapkan kesan-kesannya selama ini sebagai Ketua MPR. Menjalankan peran sebagai Ketua MPR RI, Hidayat melihat adanya dukungan kekompakan dengan Wakil Ketua MPR lainnya sebagai sebuah tim. Bahkan sampai pada akhir masa jabatan, Hidayat mengakui kekompakan di antara pimpinan MPR ini tetap terjaga. "Alhamdulillah, selama ini tidak ada konflik, tidak ada polemik antarpimpinan. Kita saling mengisi dan tenggang rasa," ujarnya.

Selain itu, selama ini juga terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan MPR dengan Sekretariat Jenderal MPR. Pekerjaan pimpinan MPR mendapat fasilitas penuh dari Sekretariat Jenderal MPR. Hidayat pun mengucapkan terimakasih kepada Sekretariat Jenderal MPR yang telah memfasilitasi demi kelancaran pekerjaan pimpinan MPR periode 2004-2009. Komitmen dan kerjasama yang baik antara pimpinan MPR dengan Sekretariat Jenderal MPR membuahkan hasil berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kesan menarik lainnya, pada Pemilu tahun 2004, Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi anggota legislatif. Suara yang diraih melebihi BPP. Baru pertama kali menjadi anggota legislatif, namun sudah terpilih menjadi ketua. "Itu pengalaman yang sangat menarik, sebab baru pertama kali menjadi anggota DPR-MPR lalu langsung menjadi ketua," kata pria asal Klaten, Jawa Tengah, ini. Sebelumnya, Hidayat tak pernah membayangkan akan memimpin sebuah lembaga negara bernama MPR.

Sementara itu, kepada MPR yang baru periode 2009-2014, Hidayat mengharapkan program sosialisasi UUD NRI Tahun 2009 tetap dilanjutkan MPR yang baru. Selain itu, MPR yang baru bisa melanjutkan prestasi yang telah diraih, yaitu penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Hidayat berharap figur pimpinan MPR mendatang yang terpilih kelak bisa mempertahankan kepemimpinan MPR pada jalurnya dalam mengawal UUD NRI Tahun 1945 dan demokrasi. Hidayat juga berharap kehormatan MPR sebagai lembaga negara tetap terjaga. "Saya harap siapa pun yang terpilih tetap menjaga nama baik MPR," katanya. (Budi Sucahyo)

Gladi Kotor Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR

Jurnal MPR (29/9). Dalam rangka persiapan Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2004-2009 yang dilaksanakan tanggal 29 September 2009 hari ini, maka seluruh karyawan Sekretariat Jenderal MPR diwajibkan mengikuti gladi kotor di Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR DR. AM Fatwa, Sesjen MPR Rahimullah, dan Wasesjen MPR Eddie Siregar. Sebelum gladi kotor dimulai, Rahimullah memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan. Dalam arahannya, Rahimullah menegaskan bahwa gladi kotor ini sebagai ajang pemanasan sebelum Sidang Akhir Masa Jabatan yang sesungguhnya. Rahimullah mengharapkan kerjasama dan kesungguhan semua pihak terkait agar Sidang Akhir Masa Jabatan MPR dapat berjalan lancar.

Pada saat gladi kotor berlangsung, para karyawan yang ditugaskan sebagai petugas pos dan protokol menduduki posnya masing-masing dan sebagian karyawan berperan sebagai anggota MPR yang menduduki kursi anggota. Layaknya gladi, masih banyak terjadi kesalahan antara masing-masing petugas, seperti misalnya petugas peraga salah menempati kursi dan juga gerakan yang terlalu cepat, sehingga gladi pun harus diulang sebanyak dua kali.

Selain acara gladi kotor, juga dilakukan simulasi pemungutan suara secara terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan Pimpinan MPR dipilih oleh anggota sehubungan dengan adanya *Judicial Review* yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Simulasi dilakukan dengan dua alternatif, yaitu pemilihan suara secara terbuka dengan semua fraksi memilih opsi dengan cara berdiri secara serentak dan pemilihan suara yang dilakukan per fraksi. Hasilnya pemilihan suara secara serentak memakan waktu lebih cepat dibandingkan dengan dilakukan per fraksi. Dalam hal ini pun petugas masing-masing lajur yang bertugas menghitung, juga dapat dilihat kesigapannya. Pada siang harinya gladi kembali berlanjut dengan dihadiri Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, beserta Istri. (Novan)

Hidayat Nur Wahid: Tunggu Keputusan Partai

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menunggu keputusan partai soal pencalonannya kembali sebagai Ketua MPR untuk periode 2009-2014. Menurut Hidayat, sekarang ini fokusnya adalah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Ketua MPR yang hanya tinggal dua hari lagi. Hidayat menjelaskan soal pencalonan kembali dirinya menjadi Ketua MPR itu menjawab pertanyaan wartawan dalam acara *press gathering* di Ruang Delegasi MPR Gedung Nusantara V Senayan, Jakarta, Senin 29 September 2009. Dalam kesempatan itu hadir pimpinan MPR lainnya, yaitu A.M. Fatwa, Moeryati Soedibyo dan Aksa Mahmud.

Dalam acara yang dihadiri 136 pemimpin redaksi dan wartawan dari berbagai media massa itu, Hidayat menyatakan, untuk urusan calon Ketua MPR, ia belum bisa menyatakan siap atau tidak siap untuk maju lagi. Menurut Hidayat, sebaiknya pemilihan ketua MPR kita serahkan saja kepada sidang paripurna MPR. Masyarakat tentunya akan dapat menilai pemilihan itu untuk apa, apakah hanya sekedar untuk menghadirkan hura- hura atau memang ingin menghadirkan pimpinan majelis yang dikehendaki rakyat.

Ketika ditanya apakah dia siap berkompetisi dengan calon lainnya, mengingat sekarang ini sudah beberapa nama masuk bursa pencalonan pimpinan MPR. Hidayat mengatakan, sangat baik bila dalam berdemokrasi tidak menggunakan istilah kompetisi, tapi bagaimana membuat lawan politik kita sebagai kawan dalam melaksanakan demokrasi.

"Saya tidak punya masalah dengan pak Taufik Kiemas, tidak juga dengan rekan-rekan yang sudah menyatakan sebagai calon pimpinan MPR. Silahkan saja, mereka itu orang-orang baik, punya potensi, dan dicalonkan partainya. Pemilihan 2004 juga begitu, ya silahkan saja. Saya siap melaksanakan keputusan partai pada saat yang tepat," tandasnya.

Taufik Kiemas, tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memang disebut-sebuat sebagai salah seorang calon Ketua MPR. Tapi, pengamat politik Indra J. Piliang lebih menjagokan calon dari Partai Golkar sebagai Ketua MPR. "Sebaiknya Ketua MPR mendatang diberikan kepada partai pemenang kedua dalam Pileg sehingga tercapai konvensi ketatanegaraan, setelah Ketua DPR diberikan kepada pemenang pertama Pemilu legislatif," tutur Indra yang juga kader Partai Golkar.

Indra melihat perebutan Ketua MPR mendatang lebih **political heavy** ketimbang mengarah kepada prinsip-prinsip kenegarawanan. "Seolah muncul ketakutan bahwa nanti presiden bisa saja di-*impeach*, sehingga menyebabkan pimpinan MPR juga dipikirkan oleh presiden terpilih," kata Indra J. Piliang menambahkan. (tt, mp)

MOORYATI SOEDIBYO:
DEKAT DENGAN KONSTITUEN DAN PERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT

JURNAL MPR (29/9). Wakil Ketua MPR RI Mooryati Soedibyo menyampaikan kesan-kesannya selama lima tahun menjadi Pimpinan MPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Menurut Mooryati, adalah menjadi menjadi kebanggaannya bila dia dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, walaupun perjuangan itu tidak selamanya berhasil, dan itu adalah dinamika politik. Mooryati menyampaikan hal itu usai acara *press gathering* yang dihadiri berbagai media cetak dan elektronik, Senin (28/9) di Ruang Delegasi Pimpinan MPR di Gedung Nusantara V.

Mooryati mengatakan, selama menjadi wakil rakyat, dia banyak menerima berbagai keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dari berbagai kalangan, mulai dari guru bantu yang ingin segera diangkat jadi PNS, gajinya tidak cukup, sampai ada seorang ibu yang menginginkan anaknya ditengok karena menderita flu burung. Mereka itu berharap banyak agar kita sebagai pimpinan MPR dapat berbuat sesuatu.

"Alangkah senangnya jika saya dan teman-teman dapat berbuat sesuatu," kata Mooryati. Itu bukan berarti sebelumnya belum berbuat sesuatu. "Saya sudah membantu keterampilan khususnya *ngadi saliro* dan *ngadi busono*, dan sekarang membantu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Mooryati menuturkan, selama lima tahun menjadi pimpinan MPR, dia telah banyak berbuat untuk rakyat, dan tiba saatnya regenerasi. Untuk itulah di periode 2009 – 2014 dia tidak mencalonkan lagi sebagai anggota DPD. "Nantinya saya sebagai pengamat saja dan saya akan *concern* di bidang pendidikan," tambahnya.

Menanggapi hubungan antara DPR dan DPD yang kurang harmonis, dia mengatakan, kalau di luar negeri anggota DPD itu senator dan perannya cukup kuat bagi ketatanegaraan mereka. Seharusnya, katanya, DPD juga demikian perlu diberi penguatan peran. "Untuk apa mereka dipilih, untuk apa lembaga ini dibentuk, jika tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Mooryati.

Di akhir masa baktinya, Mooryati menyampaikan pesan kepada anggota DPD mendatang, karena sudah dipilih oleh rakyat maka berjuanglah untuk kepentingan rakyat. "Jangan memikirkan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan sendiri maupun kelompoknya saja. Curahkan segala tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa karena kita sudah ketinggalan dibanding dengan bangsa lain," tuturnya mengakhiri pembicaraan dengan Jurnal. (tt.mp)

575 Wartawan Siap Meliput Sidang Paripurna MPR 2009

JURNAL MPR (29/9). Tercatat 575 wartawan sudah mendaftarkan diri di bagian pemberitaan untuk meliput Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan dengan agenda mendengarkan laporan kinerja pimpinan MPR yang berlangsung hari ini (29/9). Menurut staf di bagian pemberitaan, jumlah itu kemungkinan masih akan bertambah, sebab waktu pendaftaran terbuka hingga hari ini (29/09).

Hingga kemarin, wartawan terus berdatangan ke bagian pemberitaan untuk mendaftarkan diri atau mengambil kartu identitas (ID Card) yang sudah jadi. Mereka itu berasal dari 50 media nasional dan 2 media asing, terdiri dari: media cetak, elektronik (radio, televisi, media online) dan kantor berita/humas. Selain media, ada pula perwakilan dari peninjau, baik perorangan (4 orang) dan instansi (4 orang).

Cara untuk mendaftar peliputan memang cukup mudah. Hanya mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan surat tugas/rekomendasi dari pimpinan redaksi, foto kopi kartu pers, foto kopi KTP, pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, dan menyerahkan penerbitan terakhir bulan Juli, Agustus dan September 2009 untuk media cetak, dan alamat situs bagi media *online.*

Tanda pengenal peliputan di bagi dalam empat kategori. Tanda pengenal peliputan A, dapat memotret di depan podium dan setelah itu menempati *booth* kanan dan kiri. Tanda pengenal peliputan B, menempati balkon atas (kanan dan kiri). Tanda pengenal peliputan C, menempati balkon atas (tengah), dan tanda pengenal peliputan D meliput di luar Gedung Nusantara.

Setiap wartawan yang meliput dilarang membuat kegaduhan di ruang rapat, memakai celana jeans, baju T-shirt atau kaos oblong, membawa senjata api/tajam, meletakkan alat perekam di meja pimpinan, meminjamkan tanda pengenal peliputan kepada orang lain, meletakkan kamera di tempat yang dapat mengganggu suasana, dan menempatkan tempat yang tidak diperuntukkan bagi peliput.(Iman Firdaus)

Hidayat Nur Wahid dan Wali

Jurnal MPR (29/9). Sejak terpilih sebagai Ketua MPR RI tahun 2004 lalu, kehidupan Hidayat pun berubah. Hidayat yang biasanya mudah ditemui dan dihubungi tiba-tiba harus protokoler. Hidayat menjadi sulit ditemui dan telepon selulernya sibuk terus. Jika di SMS ia tak sempat membalas langsung. "Bagaimana bisa membalas langsung ketika ada rapat. Ketika mau balas, ada telepon masuk sehingga tak sempat lagi membalas," kata Hidayat dalam acara *Press Gathering* di Ruang Delegasi, Nusantara V, MPR RI, Senin, 28 September 2009.

Karena itu, ia minta maaf jika selama ia memimpin lembaga negara ini tak mengenakkan kalangan pers. "Saya minta maaf sebesar-besarnya," katanya. Dan, karena kesibukan itu, pernah seorang kiai datang menemui Hidayat seraya mengatakan, "Seharusnya Pak Hidayat menjadi wali. Dengan menjali wali Pak Hidayat bisa hadir di sejumlah tempat pada waktu bersamaan," kata sang kiai yang tak disebutkan namanya itu.

"Saya lebih memilih menjadi orang biasa saja, tidak ingin yang aneh-aneh, nanti malah membuat bingung orang. Kalaupun jadi wali, ya wali murid atau wali santri saja, karena kebetulan anak saya ada yang menjadi santri," kata Hidayat.

Wali adalah sebutan untuk kekasih Allah yang biasanya diberi karamah (kemuliaan) oleh Allah dengan beberapa kelebihan di luar jangakauan akal manusia (*khariqul 'adat*), termasuk diberi kemampuan membelah dirinya menjadi banyak, yang bisa hadir pada saat bersamaan di tempat yang berbeda. (Musthafa Helmy)

Hidayat Nur Wahid Turut Serta Mengedit Gambar Video

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tak segan-segan mendatangi ruang kerja Media Visual (Medvis) di Gedung Nusantara III Lantai 10, Kompleks MPR/DPR, Ahad (27/9) malam. Hampir selama 3 (tiga) jam nonstop, dari pukul 19.30 sampai 22.30 WIB Hidayat memilih dan mengarahkan gambar-gambar video sebagai bahan tayang pidato di Sidang Akhir Masa Jabatan Pimpinan MPR, Selasa (29/9).

Gambar video diambil dari dokumentasi, mulai proses amandemen sampai kegiatan pimpinan periode 2004-2009. Beberapa pejabat yang mendampinginya, diantara Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Drs. Aip Suherman, Kepala Biro Humas M. Rizal, M.Si., dan beberapa pegawai di bagian Medvis.

"Selama hampir tiga jam, beliau memilih dan mengarahkan cuplikan video yang akan ditayangkan di Sidang Akhir Masa Jabatan nanti (hari ini, *red*)," terang Rizal.

Kepala Sub Bagian Medvis Slamet Eko mengaku senang mendapat kunjungan orang nomor satu di MPR itu. Selama ini, baru Hidayat satu-satunya Ketua MPR yang berkunjung langsung dan memilih rekaman video. Bahkan, saking grogi-nya, Ari Suprapto yang bertindak sebagai editor, tangannya sampai gemetar berada di samping Hidayat.

"Ini pengalaman pertama saya berdekatan langsung dan mengedit bersama-sama dengan Pak Hidayat," komentar Ari. (Rini S. Danudjaja).